

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah-----	1
2. Tujuan Penelitian -----	5
3. Manfaat Penelitian -----	6
4. Tinjauan Pustaka -----	7
5. Metode Penelitian -----	17
6. Pertanggungjawaban Sistematis-----	20
BAB II PEMBUKTIAN EIGENDOM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA	
1. Eigendom Sebelum Berlakunya UUPA	27
2. Eigendom Setelah Berlakunya UUPA	29
BAB III KEDUDUKAN EIGENDOM VERPONDING TERHADAP PEMBATALAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI LELANG	
1. Perolehan Hak Atas Tanah	41
2. Pemindahan Hak Melalui Lelang	49
DAFTAR BACAAN	
WEBSITE	
LAMPIRAN	

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang *Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir*, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1958

Undang – Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Nomor 1 Tahun 1958*, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1958.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*, LNRI Tahun 1997 Nomor 59-TLNRI Nomor 3696.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang *Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang *Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti*

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang *Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat*